

### **BAB III**

## **REKRUTMEN DAN SELEKSI DI BPRS JABAL NUR SURABAYA, SERTA STANDART KOMPETENSI LULUSAN EKONOMI ISLAM IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

### **A. Profil BPRS Jabal Nur Surabaya**

#### **1. Latar Belakang berdirinya BPRS Jabal Nur**

Krisis ekonomi dan moneter yang cukup lama melanda Bangsa Indonesia (tahun 1997 sampai dengan tahun 2002), telah membuat Bank Umum Konvensional bangkrut, sedangkan lembaga perbankan syariah tetap eksis tanpa bantuan liquiditas. Akhirnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang didukung oleh dunia perbankan menyiapkan sarana yuridis bagi perbankan berdasarkan syariat Islam dengan meninjau kembali UU perbankan no.7/1992.

UU tersebut kemudian direvisi dengan UU perbankan no.10/1998 dan UU No.23/1999 (tentang Bank Indonesia) yang kemudian diikuti dengan pedoman pelaksanaannya lewat peraturan bank Indonesia no.41/2002. Kemudian berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan disusul bank umum mandiri, maka Bank Rakyat Indonesia (BRI), juga mulai mendirikan beberapa cabang dan unit usaha perbankan berlandaskan syariah Islam.

Untuk menghindari adanya penipuan, pada tahun 2003, Satuan Pengawasan Intern Bank Rakyat Indonesia (SPI - BRI) bekerjasama dengan Divisi Pendidikan & Pelatihannya BRI membuka pendaftaran bagi seluruh jajaran yang ada dalam kendalinya untuk mengikuti pendidikan di bidang pengetahuan perbankan syariah. Dengan tujuan, menyiapkan kader yang mampu untuk melakukan pemeriksaan terhadap cabang dan unit syariah BRI.

Pada kenyataannya, pendidikan tersebut tidak begitu diminati. Di kantor Inspeksi BRI Surabaya (dibawah struktur SPI-BRI) yang berwilayah kerja keseluruhan Jawa Timur dengan jumlah pejabat dan Auditor Internal berkisar 50 orang, hanya satu orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pendidikan di bidang pengetahuan perbankan syariah waktu itu yaitu Sarpandi R. Hami dengan jabatan sebagai ketua tim audit.

Sarpandi R. Hami (yang masa dinasnya di BRI tinggal 8 bulan) berangkat menuju Jakarta untuk dididik selama 5 hari kerja mulai tanggal 26 sampai dengan 30 April 2004, oleh para pakar perbankan syariah di LPPI (Lembaga Pendidikan & Pengembangan Perbankan Indonesia) Jakarta. Dari pendidikan tersebut, beliau mempunyai ide mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Timur, hal ini dianggap sebagai langkah awal dalam menegakkan ekonomi

Islam. Ide tersebut disampaikan kepada para pengajar atau dosen syariah LPPI pada saat berpamitan setelah penutupan kursus.

Ketika beliau sudah kembali ke Surabaya, pada tanggal 7 April 2004 beliau berdiskusi dengan temannya (Wustono Wagis) dan menghasilkan:

- a. Mendirikan BPRS dengan niat ibadah kepada Allah SWT, untuk menegakkan syariah Islam dalam bermuamalah dibidang ekonomi/keuangan secara Islami sesuai firman dan sabda RasulNya seperti yang diceramahkan oleh para ustadz di Masjid Al-Akbar Surabaya dan dosen syariah di LPPI Jakarta.
- b. Segmen pasar yang akan dilayani adalah masyarakat kecil dengan usaha-usaha kecil dan mikro di Kota Surabaya khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya yang merupakan umat Islam dengan ekonomi lemah dan terpinggirkan jauh dari akses ke perbankan konvensional.
- c. Diusahakan menjadi bank yang kuat dengan pelayanan terbaik dibidang usaha kecil dan mikro diantara BPRS yang ada.
- d. Lokasi kantor adalah bangunan yang belum selesai dibangun, milik Pak Wustono sendiri.

- e. Permodalan akan diusahakan dari teman-teman Pak Wustono maupun dari teman-teman Sarpandi R.Hami yang mempunyai visi dan misi yang sama.

Pencarian investor dilakukan selama bulan April dan Mei 2004, dari usaha tersebut Sarpandi RH. berhasil mengajak calon investor sebanyak empat orang pekerja BRI (Eko Juhartono, Machfud, Karsono dan Sudarsono) dan lima orang tetangganya yang dianggap berminat (Herminto Wirio Saputra, Zarkasi, Ny. Sutjipto, Ny. Rudianto dan Muhariadi), sedangkan Wustono tidak menyebut nama-nama calon investornya. Diperkirakan dana yang terkumpul antara satu sampai dua milyar. Jika BPRS untuk Kota Surabaya memerlukan modal satu milyar, maka yang satu milyar lagi dapat digunakan sebagai modal dua BPRS di luar Surabaya tapi masih dalam Provinsi Jawa Timur. Di samping itu juga diperoleh keputusan bahwa:

- a. Jumlah BPRS yang akan didirikan tetap ditargetkan tiga BPRS dengan pertimbangan:
  - 1) Sebagai salah satu cara memperkecil resiko, apabila terjadi permasalahan *fraude* (penipuan) pada salah satu BPRS sehingga mengakibatkan kerugian besar, maka dua BPRS yang lain masih tetap hidup dan terus dapat dikembangkan untuk menutup kerugian BPRS yang terkena masalah.

- 2) Dapat menampung tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga keinginan pemilik atau pemegang saham untuk mempekerjakan keluarganya tidak terlalu terkendala karena peluang kerja yang tersedia cukup luas.
- 3) Dapat dilakukan *efisiensi* dalam pengadaan logistik, sumber daya manusia dan pendidikan, karena satu peralatan dan sumber daya manusia ada yang dapat dipakai bersama oleh semua BPRS. Pengadaan logistik dalam jumlah besar untuk tiga BPRS sekaligus, tentu akan jauh lebih murah dari pada hanya pengadaan untuk satu BPRS saja. Tenaga Komisaris dapat dirangkap untuk tiga BPRS secara sekaligus sehingga jumlah komisaris tidak perlu terlalu banyak. Sampai batas tertentu tenaga pengawas syariah juga dapat merangkap sampai dua BPRS.
- 4) Akan muncul persaingan sehat antar BPRS dalam satu group, karena bisa dibandingkan antara direksi dan pekerja yang giat serta direksi dan pekerja yang malas.
- 5) Dengan banyaknya posisi jabatan yang tersedia, maka pejabat atau pekerja yang berprestasi dapat lebih leluasa mengembangkan karirnya, dan juga akan muncul lebih banyak kader-kader berprestasi untuk dipromosikan dalam jabatan-jabatan strategis guna mengembangkan perusahaan.

b. Perlu dibentuk segera lembaga support berupa koperasi, dengan pertimbangan:

- 1) Lembaga koperasi merupakan *entitas* yang dapat memiliki berbagai jenis usaha bisnis guna mensupport kebutuhan BPRS di bidang logistik, inventaris, sewa bangunan, kendaraan dan juga dapat memiliki usaha yang sejenis dengan usaha BPRS, yaitu unit usaha BMT sebagai salah satu tempat kaderisasi sumber daya manusia untuk mengisi lowongan jabatan pada BPRS.
- 2) Mengingat calon anggota direksi atau pejabat BPRS yang akan didirikan juga direkrut dari BPRS lain yang sudah berjalan, maka selama dalam penantian beroperasinya BPRS yang akan didirikan, mereka dapat dipekerjakan dan digaji oleh koperasi lewat usaha BMT sebagai pengganti gaji mereka pada BPRS yang ditinggalkan.
- 3) Para calon pekerja BPRS yang akan didirikan, untuk sementara dapat dipekerjakan pada unit usaha BMT baik itu sebagai latihan ketrampilan, juga sebagai bahan evaluasi dan seleksi untuk dapat ditempatkan pada BPRS.
- 4) Sebagai lembaga dengan berbagai jenis unit usaha, koperasi akan mengakomodir kebutuhan para pejabat atau pekerja BPRS, baik dalam bidang pembiayaan maupun kebutuhan lainnya.

- c. Agar semua unit usaha koperasi dan BPRS tetap berjalan dalam koridor sesuai dengan yang diinginkan oleh pemegang saham BPRS dan anggota koperasi, maka anggota pengurus dan badan pengawas koperasi harus dilakukan oleh orang yang sama dengan yang menjabat sebagai anggota dewan komisaris BPRS minimal satu orang, dengan jabatan dan wewenang yang kuat pada kedua entitas bisnis tersebut.
- d. Agar kebijakan pengaturan rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi secara obyektif, dengan mempertimbangkan kepentingan dan perkembangan bisnis semua unit usaha secara keseluruhan, maka kebijakan tersebut harus berada di satu lembaga yang berdiri bebas dari kekuasaan direksi BPRS dan pengurus koperasi, serta dapat melihat perkembangan organisasi bisnis secara menyeluruh. Sementara lembaga tersebut belum terbentuk, maka pemegang saham dan anggota koperasi dapat menyerahkannya kepada pejabat yang mewakili pemegang saham BPRS dan anggota koperasi.

Keempat hal tersebut yang akan dijadikan sebagai bahan presentasi pencetus ide dalam pertemuan-pertemuan dengan para calon investor dan juga sebagai bahan utama dalam memasarkan ide untuk mendapatkan tambahan investor.

## 2. Persiapan Pendirian BPRS dan Koperasi

Untuk merealisasikan ide pendirian tiga BPRS tersebut, Sarpandi RH. meminta tolong kepada salah seorang imam masjid Al-Akbar (Bapak Mukhtafi Sahal) untuk mencari tenaga yang diperlukan di IAIN Sunan Ampel tempat beliau bekerja, dengan catatan bahwa tenaga yang akan dicari adalah tenaga dari alumni IAIN yang menurut beliau adalah tenaga yang cukup baik dan mumpuni.

Pada pertengahan bulan Juni 2004 ketiga calon yang diajukan oleh imam masjid Al-Akbar, menemui Sarpandi RH di kantor inspeksi BRI Surabaya (Jalan Jenderal A. Yani Surabaya). Setelah berkenalan, kemudian ketiganya diminta untuk datang lagi dua minggu kemudian. Ternyata yang datang hanya dua orang yaitu Amin Wahyudi, MEI dan Maria Ulfah, MEI. Kepada keduanya diberi arahan dan wawasan dalam rangka pendirian tiga BPR dengan sistem operasional syariah, dan untuk memulai bekerja satu minggu kemudian. Di samping itu, Sarpandi RH juga mengundang tetangganya Herminto (pensiunan Pemimpin Cabang Bank Bumi Daya di Ternate) yang juga antusias ikut mendirikan BPRS tersebut dan sekaligus sebagai salah seorang investor.

Dalam pertemuan di rumah Sarpandi RH tersebut (Jl.Taman Indah II/16 Sepanjang-Taman Sidoarjo), diputuskan 2 hal yaitu :



- a. Segera melaksanakan rapat dengan para calon investor paling lambat bulan Agustus 2004.
- b. Mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu sebagai bahan pertemuan tersebut, antara lain :
  - 1) Mencari masukan dari Bank Indonesia Surabaya tentang cara mendirikan BPRS yang akan dilakukan oleh Herminto.
  - 2) Membuat bahan presentasi tentang pendirian BPRS yang akan dilakukan oleh Sarpandi R. Hami dengan bantuan bahan-bahan dari Amin Wahyudi dan Maria Ulfah di bidang syariahnya.
  - 3) Mencari tambahan investor lain yang mungkin berminat (oleh Sarpandi R. Hami).
  - 4) Menyiapkan tempat pertemuan pertama dengan para calon investor (oleh Sarpandi RH).

Sebagai realisasi keputusan di atas, maka pada tanggal 29 Juli 2004 Herminto berkonsultasi dan mencari informasi mengenai cara pendirian BPRS dengan pejabat Bank Indonesia cabang Surabaya. Hasilnya diserahkan ke Sarpandi RH tanggal 4 Agustus 2004 untuk bahan presentasi dalam pertemuan dengan para calon investor. Disamping itu, Sarpandi R. Hami juga mendapatkan bahan-bahan menyangkut ringkasan ketentuan BI dalam pendirian BPRS dari temannya di Jakarta yaitu Slamet, SH, mantan pejabat BRI yang pindah ke bank Danamon di

Jakarta. Sedangkan untuk tempat pertemuan pertama dengan calon investor yaitu Eko Juhartono (Kepala Sentra Pendidikan BRI Surabaya) yang juga calon investor menyediakan satu ruangan kelas di Sentra Pendidikan (Sendik) BRI Surabaya asal dilaksanakan pertemuan pada hari libur. Akhirnya pada hari Ahad tanggal 29 Agustus 2004 dilaksanakan pertemuan para calon investor.

Setelah presentasi yang disampaikan oleh Sarpandi RH, kemudian dibuka sesi untuk menyatakan komitmen modal saham yang akan mereka sanggupi, maka dari lima belas orang yang sudah bersedia untuk menjadi investor sebanyak dua belas orang menyatakan komitmennya dengan total nilai investasi sebesar Rp 1.900.000.000.

Penetapan lokasi dan nama BPRS juga didukung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional yaitu :

1) Pertimbangan Lokasi kantor :

1) Ditetapkan Kota Surabaya sebagai lokasi kantor BPRS Jabal Nur dan Koperasi Tursina, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a) Hampir 70 % asset perbankan ada di kota Surabaya, dan ini menunjukkan bahwa kota Surabaya sebagai pusat ekonomi Jawa Timur dan Indonesia bagian Timur memiliki potensi

- perbankan hampir tiada batas, mengikuti pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Indonesia bagian Timur.
- b) Dana masyarakat Jawa Timur sebagian besar beredar di Kota Surabaya, sehingga merupakan tempat mengumpulkan dana perbankan yang paling potensial di Jawa Timur, dan ini merupakan dasar yang kuat untuk mengembangkan jaringan unit-unit usaha atau *outlet* baru keseluruh Jawa Timur.
  - c) Sebagai basis utama ke depan untuk mengembangkan BPRS menjadi Bank Umum Syariah.
  - d) Belum ada BPRS yang berdiri di Kota Surabaya sehingga dalam level BPR ia menjadi pemain pemula dengan peluang besar tanpa kompetitor sesama BPR Syariah.
- 2) Ditetapkannya Kota Pandaan sebagai lokasi kantor BPRS Jabal Tsur, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a) Kota Pandaan adalah salah satu wilayah kabupaten Pasuruan yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dengan jenis aktifitas ekonomi masyarakat yang beragam (kerajinan, industri pabrikan, pertanian dan wisata).
  - b) Berada ditengah diantara wilayah-wilayah makmur dari Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Malang dan Pasuruan

sehingga pangsa pasar pembiayaan yang akan dikembangkan juga banyak, luas dan beragam.

- c) Mudah dijangkau dari Surabaya, sehingga apabila pengurus BPR nya berdomisili di Surabaya, masih tidak masalah dan tidak melanggar jarak dan jam perjalanan anggota direksi yang ditentukan Bank Indonesia.
  - d) Belum ada BPRS yang berdiri di Kota Pandaan sehingga dalam level BPR ia menjadi pemain pemula dengan peluang pasar tanpa kompetitor sesama BPR Syariah.
- 3) Ditetapkannya Kota Mojo Agung sebagai lokasi kantor BPRS Jabal Rachmah, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a) Kota Mojo Agung adalah salah satu wilayah kabupaten Jombang paling besar potensi ekonominya dan berbatasan dengan wilayah kabupaten Mojokerto yang memiliki potensi ekonomi yang juga cukup besar dengan jenis aktifitas ekonomi masyarakat yang beragam (kerajinan, industri & pertanian).
  - b) Berada di tengah diantara bagian wilayah Jombang dan Mojokerto yang relatif makmur sehingga pangsa pasar pembiayaan yang akan di-kembangkan juga banyak, luas baik kedalam Kabupaten jombang maupun Mojokerto.

- c) Mudah dijangkau dari Surabaya, sehingga apabila pengurus BPR nya berdomisili di Surabaya, masih tidak masalah dan tidak melanggar jarak dan jam perjalanan anggota direksi yang ditentukan Bank Indonesia.
- d) Belum ada BPRS yang berdiri di Kota Mojo Agung sehingga dalam level BPR ia menjadi pemain pemula dengan peluang pasar tanpa kompetitor sesama BPR Syariah.

### 3. Visi, Misi dan Program PT. BPRS Jabal Nur Surabaya

#### a. Visi

- 1) Visi Sebagai Kholifah : mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati (menuju Allah).
- 2) Visi *Corporate Culture* : Menjadi bank pembiayaan rakyat syariah terkemuka yang selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan dan kepuasan nasabah (dalam sistem ekonomi non riba)

#### b. Misi

- 1) Misi Sebagai Kholifah: Sebagai penyebar rahmat yang diberikan Allah kepada seluruh alam.
- 2) Misi *Corporate Culture* :

- a) Melakukan pelayanan perbankan sistem syariah terbaik berlandaskan imtaq (iman dan taqwa) dan ibadah dengan mengutamakan pelayanan pada pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk membangun atau menunjang perkembangan ekonomi masyarakat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya.
- b) Memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada nasabah dengan melaksanakan gcg berlandaskan imtaq.
- c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada nasabah dan *stakeholders*.

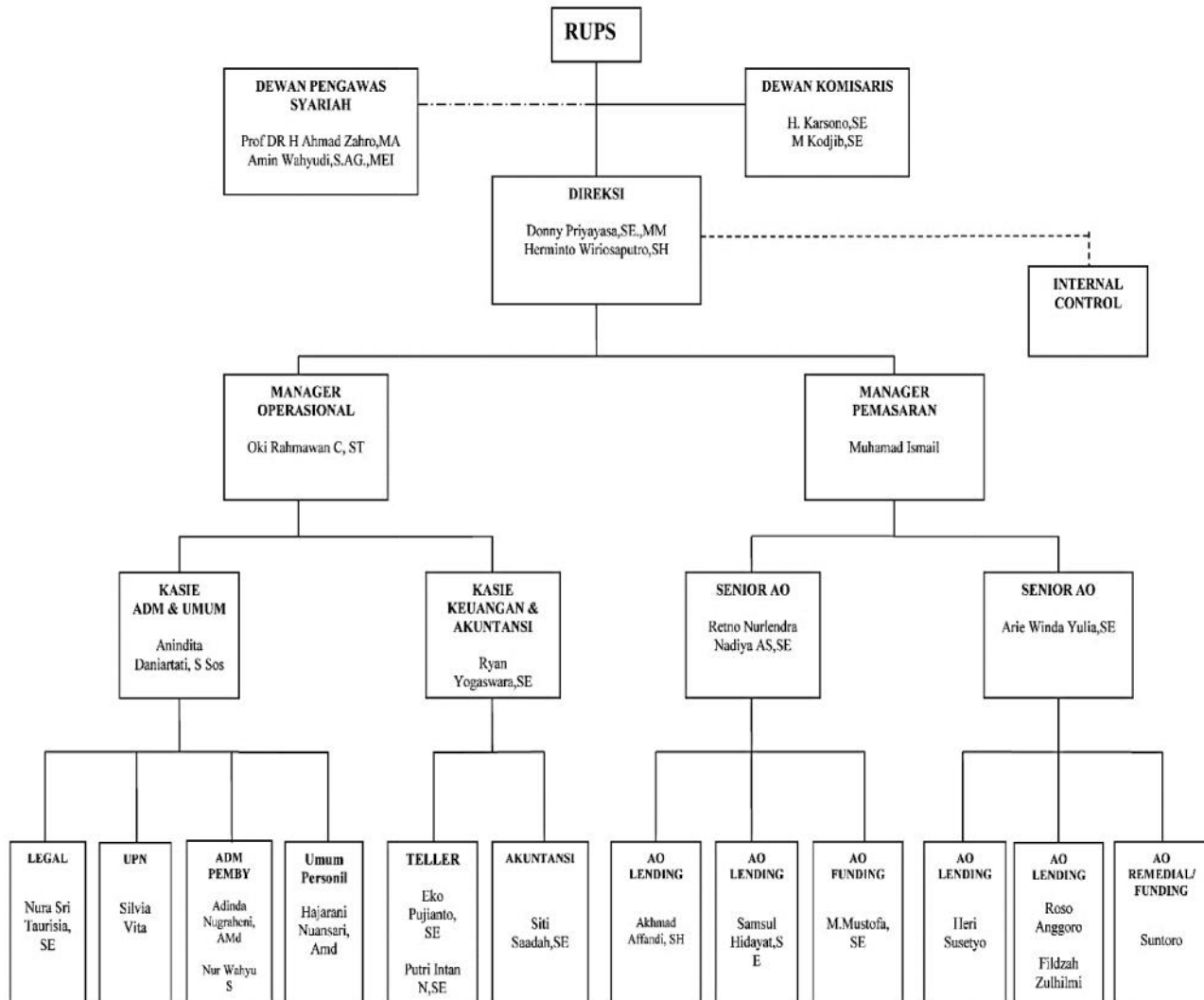
c. Program

Penggalangan simpanan atau tabungan untuk menolong diri sendiri dan sesama saudara yang mempunyai usaha yang berjenis mikro ataupun makro. Pengembangan usaha ini akan berjalan melalui fasilitas pembiayaan berupa modal usaha yang termasuk dalam salah satu produk dari bank.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi BPRS Jabal Nur Surabaya.

## 4. Struktur Organisasi BPRS Jabal Nur Surabaya



Sumber: Dokumentasi BPRS Jabal Nur Surabaya

## 5. Data SDM dan Latar Belakang Pendidikannya

**DAFTAR KARYAWAN PT. BPRS JABAL NUR SURABAYA**

<b>No</b>	<b>Nama Karyawan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Pendidikan</b>
1.	Donny Priyayasa SE, MM	Direktur Utama	S3
2.	Herminto Wiriosaputro SH	Direktur	S1
3.	Oki Rahmawan Cahyadi, ST	Manajer Operasional	S1
4.	Arie Widya Yuliana, SE	Senior AO	S1
5.	Muhammad Ismail	Manajer Pemasaran	SMA
6.	Retno Nurlendran Nadiya AS, SE	Senior AO	S1
7.	Suntoro	Junior AO	SMA
8.	Herry Susetyo	Junior AO	S1
9.	Nati Wardani	Junior AO	S1
10.	Anidita Diaiartati, S.Sosio	Kasie Operasional	S1
11.	Ryan Yogaswara, SE	Kasie Akuntansi	S1
12.	Nura Sri Taurisia, SE	Unit Legal	S1
13.	Hajarani Nuansari, A.Md	Admin Umum	D3
14.	Adinda Nugraheni, A.Md	Admin Umum	D3
15.	Siti Sa'adah, SE	Accounting	S1
16.	Eko Pujianto, SE	Teller	S1
17.	Akhmad Afandi, SH	Junior AO	S1
18.	Samsul Hidayat, SE	Junior AO	S1
19.	Edwan Dharis N	Trainee	S1
20.	Putri Intan Naganingtyas, SE	PS Teller	S1
21.	Binti Robbi Salim	PS Junior AO	S1
22.	Fildzah Zulhilmi	PS Junior AO	SMA
23.	Nur Wahyu Seftyanti, SE	SDM	S1
24.	Sanik	Cleaning Service	SMA
25.	Suadi Bahtiar	Kepala kantor Cabang SDA	SMA
26.	Yani Lutfiyah	UPN KC sda	S1
27.	Syaifudin Abdullah ,SE	Kepala Kantor Cabang Sby	S1
28.	Eny Rohimatul F	Admin Umum	S1
29.	Ikhwanul Dian F	Cleaning Service	SMA
30.	Langgeng Prastiyo, SE	Junior AO	S1
31.	Silvia Vita Marshinta Devi	UPN	S1
32.	Elisa	Teller KC Sda	SMA
33.	Eva Putri Perdanawati, SH	Supervisor KC Sda	S1
34.	Yeni Eka Styawati, SP	Unit Admin Legal	S1
35.	Rizkina Sumunaring I, S.Sos	UPN	S1
36.	Andi Muhammad Nur	Junior AO	D3
37.	Pram Puji Rahayu, Am.d	Internal Control	D3
38.	Sri Wulandari	Asisten IC	D3
40.	Eva Ika Ferdina	Teller Kantor Kas	D3
42.	Mummad Iqbal, S.I.Kom	UPN Kantor Kas	D3



43.	M. Mustofa, SE	Kepala Kantor Kas	S1
44.	Briva Bagus P, S.Kom	Junior AO	S1
45.	Suwignyo	Sopir	SMA
46.	Aries s	Satpam	SMA
47.	Suyitno	Satpam	SMA
49.	Lusiyatin	Satpam	SMA
50.	Suprpto	Satpam	SMA

Sumber: Dokumentasi BPRS Jabal Nur Surabaya

## B. Kompetensi SDM yang dibutuhkan di BPRS Jabal Nur Surabaya

### 1. Kriteria SDM yang dibutuhkan di BPRS Jabal Nur Surabaya

Pada umumnya, kriteria atau persyaratan yang diajukan oleh pihak BPRS Jabal Nur adalah sesuai dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan. Ada beberapa iklan yang mencantumkan salah satu kriteria adalah minimal berijazah SMA, tetapi ada juga yang mengharuskan minimal berijazah S1. Semua itu tergantung pada bidang pekerjaan yang sedang dibutuhkan oleh BPRS. Usia, pengalaman kerja, penampilan, background pendidikan, sehat jasmani dan rohani juga termasuk dalam kriteria yang dibutuhkan oleh BPRS.<sup>2</sup>

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, BPRS Jabal Nur lebih mengutamakan pelamar yang memiliki *soft skill* dibanding dengan *hard skill* dengan prosentase perbandingan 60:40. *Soft skill* merupakan ketrampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (*interpersonal skill*) yang mampu mengembangkan kerja secara maksimal. Adapun *soft skill* yang dibutuhkan BPRS Jabal Nur adalah:

<sup>2</sup> Oki Rahmawan (*Manajer Operasional* BPRS Jabal Nur Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2014.

- a. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah
- b. Kemampuan bekerjasama dengan kelompok (karyawan lain)
- c. Kemampuan berkomunikasi dengan orang atau karyawan lain
- d. Sopan santun
- e. Kemampuan beradaptasi
- f. Disiplin tinggi
- g. Mandiri.

Sedangkan *hard skill* adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, ketrampilan, dan ketrampilan teknis yang sesuai dengan bidang ilmunya, adapun *hard skill* yang dibutuhkan BPRS Jabal Nur diantaranya:

- a. Kecerdasan individu
- b. Pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam.

Selain *hard skill* dan *soft skill* diatas, terdapat kriteria lain yang menjadi pertimbangan dalam merekrut karyawan, yaitu pengalaman kerja dan latar belakang dari pelamar itu sendiri.<sup>3</sup>

## 2. Proses Rekrutmen di BPRS Jabal Nur Surabaya

Ketika pusat ataupun salah satu cabang membutuhkan karyawan maka akan dibuka lowongan pekerjaan dengan dua metode, yaitu internal

---

<sup>3</sup> Oki Rahmawan, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2014.

dan eksternal.<sup>4</sup> Metode internal adalah memanfaatkan sumber-sumber atau cara yang sudah tersedia di dalam perusahaan sebelum mencarinya di luar atau keluar perusahaan.<sup>5</sup> Adapun metode internal yang digunakan oleh BPRS Jabal Nur adalah melalui referensi manajemen atau meminta bantuan dari karyawan lama.<sup>6</sup> Karyawan yang bekerja di BPRS Jabal Nur merekomendasikan saudara atau teman mereka untuk bekerja di BPRS.

Sedangkan metode eksternal adalah teknik yang umum digunakan perusahaan untuk mencari calon karyawan dari sumber-sumber luar perusahaan. Metode eksternal yang digunakan adalah dengan cara membuat iklan lowongan pekerjaan di Koran dan mencari dari arsip (bank data) pelamar. Dalam iklan tersebut dicantumkan kriteria-kriteria ataupun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelamar.<sup>7</sup>

Setelah itu, setiap pelamar akan menjalani tes tulis dan juga wawancara yang merupakan tahap seleksi. Tes tulis sendiri, disamping psikotest juga terdapat soal-soal tentang perbankan, baik syariah maupun konvensional, tapi lebih ditekankan pada perbankan syariah.<sup>8</sup> Sedangkan wawancara biasanya digunakan untuk mengetahui kecakapan dan juga *soft skill* dari pelamar akan terlihat dalam tahap ini.

---

<sup>4</sup> Ibid., 25 Juni 2014.

<sup>5</sup> Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 47.

<sup>6</sup> Oki Rahmawan, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juni 2014.

<sup>7</sup> Ibid., 25 Juni 2014.

<sup>8</sup> Ibid.

### 3. Persepsi terhadap Lulusan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya

Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya jurusan ekonomi Islam dipandang berkompeten di bidang perbankan syariah, beliau berpendapat bahwa ketika memasuki dunia kerja, pihak BPRS tidak terlalu sulit untuk mengajarkan tentang sistem syariah yang digunakan di BPRS Jabal Nur. Hal ini dikarenakan, mereka yang berasal dari perguruan tinggi syariah sudah diajarkan tentang materi-materi yang berkaitan dengan perbankan syariah, sehingga akan lebih mudah ketika mempraktekkannya. Kinerjanya juga dinilai bagus dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, jujur dan amanah.

Dengan demikian, lulusan dari perguruan tinggi syariah termasuk IAIN Sunan Ampel Surabaya mempunyai peluang yang lebih besar di BPRS Jabal Nur dari pada mereka yang berasal dari perguruan tinggi umum. Akan tetapi, syarat-syarat dan kriteria yang diajukan oleh pihak BPRS tetap menjadi prioritas utama dalam merekrut karyawan.<sup>9</sup>

Di BPRS Jabal Nur ternyata terdapat karyawan yang merupakan lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau berasal dari fakultas syariah dan bekerja di bagian *accounting*. Akan tetapi, beliau sudah lama mengundurkan diri dikarenakan urusan keluarga. Menurut salah satu karyawan di BPRS Jabal Nur, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya

---

<sup>9</sup> Ibid.

mampu bersaing dengan lulusan lain, baik dalam hal pengetahuan ataupun kinerjanya. Di samping itu juga, selalu mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam pekerjaannya, dan tidak jarang membantu karyawan lain dalam mengatasi masalah-masalah mereka.<sup>10</sup>

Menurut pandangannya, tidak dapat dipungkiri bahwa *soft skill* sangat berguna di dunia kerja, terlebih lagi sebagai seorang marketing, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain sangat diperlukan dalam hal ini. Meskipun demikian, penguasaan ilmu di bidang perbankan syariah juga sangat diperlukan. Di samping itu, dalam dunia kerja, kemampuan akademik saja tidak cukup, akan tetapi juga diperlukan kemampuan non akademik (*soft skill*). Karena dalam suatu perusahaan tidak hanya kecerdasan individual saja yang diperlukan, tapi juga kemampuan bekerjasama dengan sesama karyawan.<sup>11</sup>

### C. Standar Kompetensi Lulusan Ekonomi Islam (Syariah)

#### 1. Profil Program Studi Ekonomi Syariah

Program Studi Ekonomi Syariah memiliki peran penting dan strategis bagi pengembangan ekonomi Islam, perbankan syariah, asuransi syariah, penggadaian syariah, koperasi jasa keuangan syariah dan bisnis Islam lainnya di Jawa Timur dan di Indonesia pada umumnya. Lebih-

---

<sup>10</sup> Nura Sri Taurisia, *Wawancara*, Surabaya, 7 Juli 2014.

<sup>11</sup> Ibid

lebih pada era sekarang ini, dimana sistem ekonomi Islam telah membuktikan diri sebagai system ekonomi alternatif dan teruji keampuannya dalam menghadapi krisis ekonomi global. Inilah peluang dan tantangan program studi ekonomi syariah untuk terus terlibat dan memainkan perannya dalam mensosialisasikan, menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ekonomi Islam bagi masyarakat luas melalui sarjana-sarjana berkualitas yang akan dilahirkannya.

Apalagi saat ini, seiring dengan ambruknya keuangan Amerika Serikat 2009 dan pesatnya perkembangan ekonomi syariah, maka sudah saatnya ekonomi liberal dengan model produksi kapitalistik menengok model ekonomi yang lain, seperti ekonomi syariah, karena memiliki konsep yang lebih adil dan *prudent*. Demikian pendapat pakar-pakar keuangan Barat, termasuk para pemimpinnya, seperti, Cristine Lagarde (Menteri Keuangan Prancis), Kevin Rudd (Mantan Perdana Menteri Australia) dan Paus Benedictus.

Di Indonesia sendiri, sistem ekonomi syariah telah berkembang dengan pesat. Menurut Susilo Bambang Yudohyono Indoensia dapat berpeluang menjadi platform pusat ekonomi syariah di Asia, bahkan dunia. Memang, sejak Indoensia menghadapi krisis moneter sejak Juli 1997, ekonomi Islam telah menemukan momentumnya sebagai alternatif sistem ekonomi Indonesia dan dunia.

Seperti diuraikan di atas, tumbuh suburnya ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia pada akhirnya telah berimplikasi terhadap terbukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, baik sektor formal maupun informal dengan sistem yang mengacu kepada sistem ekonomi Islam. Pesatnya ekonomi Islam dan Industri Perbankan Syariah serta lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, pada sisi lainnya tentunya harus diimbangi dengan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Tanpa SDM yang memadai, mustahil lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Di sinilah peran strategis yang harus dimainkan oleh Fakultas Syariah, dengan mengambil peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh semua lembaga di atas. Peran Fakultas Syariah, dalam hal ini prodi ekonomi syariah, dalam menyiapkan sumber daya manusia ini sangat menjadi strategis sekaligus menantang. Peluang tersebut ternyata telah ditangkap dan direalisasikan oleh pimpinan Fakultas Syariah dengan mengajukan pembukaan Program Studi Ekonomi Syariah, dan Alhamdulillah, pada akhir 2008, lewat Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Nomor: DJ.I/306/2008, tertanggal 4 September 2008, Program Studi tersebut telah mendapatkan legilitas dari kementerian Agama. Dan pada semester

ganjil tahun akademik 2009/2010, tepatnya tanggal 1 September 2009, program studi ekonomi syariah telah memulai perkuliahan perdananya.

Dalam rangka penyediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, maka program studi ekonomi syariah hadir dengan satu tekad yaitu akan menjadi program studi yang unggul, berkualitas dan memberikan kontribusi terbaiknya dalam menyokong tumbuh kembang ekonomi Islam di Indonesia dan dalam rangka menebarkan sebanyak-banyaknya kemaslahatan untuk bangsa dan Negara serta bagi umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia umumnya.

Menampilkan performance program studi ekonomi syariah yang unggul, mandiri dan terbaik menjadi komitmen dan keharusan bagi seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah, khususnya bagi pengelola program studi ekonomi syariah. Itulah yang menjadi ide dasar dan latar belakang hadirnya prodi ekonomi syariah ini dan menjadi impian serta cita-cita dari pengelola program studi.<sup>12</sup>

## 2. Visi – Misi Program Studi Ekonomi Syariah

### a. Visi:

“Menjadi pusat kajian dan pengembangan ekonomi Islam yang unggul, mandiri dan berwawasan global pada Tahun 2020.”

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI IAIN Sunan Ampel Surabaya Keputusan Rektor No. In.02/1/PP.00.9/269/P/2013, Dokumen 1 Kurikulum Program Studi Ekonomi Syariah, 4.



b. Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ekonomi syariah secara baik dan benar
- 2) Mengembangkan penelitian ekonomi syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat
- 3) Meningkatkan peran serta dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat
- 4) Membangun dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, dalam dan luar negeri.<sup>13</sup>

3. Struktur Kurikulum dan Beban Belajar Mahasiswa

a. Profil Lulusan

Profil lulusan mahasiswa program studi ekonomi syariah adalah menguasai teori-teori ekonomi syariah dan mampu mengaplikasikan dalam dunia praktis. Lulusan program studi ekonomi syariah harus memiliki pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.

Berdasarkan standart kompetensi yang ditetapkan oleh program studi ekonomi syariah, lulusan diarahkan menjadi professional di berbagai bidang ekonomi yang berprinsip syariah misalnya: lembaga keuangan syariah yang berupa perbankan syariah,

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI IAIN Sunan Ampel Surabaya Keputusan Rektor No. In.02/1/PP.00.9/269/P/2013, Dokumen 1 Kurikulum Program Studi Ekonomi Syariah, 15.

bank pembiayaan rakyat syariah. Lembaga keuangan syariah non bank yang berupa asuransi syariah, penggadaian syariah, lembaga investasi syariah, lembaga pengelolaan dana zakat, *infāq* dan *sadaqah*, *bait al-māl wa at-tamwīl*, koperasi jasa keuangan syariah dan sebagainya.

b. Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan program studi ekonomi syariah, terdiri dari kompetensi dasar, kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi pilihan.

1) Kompetensi dasar

Kompetensi dasar sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sebagai dasar bagi dasar kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi pilihan atau lainnya. Adapun kompetensi dasar dari prodi ekonomi syariah sebagai berikut:

- a) Memiliki ilmu tentang Islam serta mampu menerapkannya di masyarakat
- b) Menjadi sarjana muslim yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia

- c) Memiliki rasa kebangsaan, kebinekaan, cinta tanah air, demokratis dan rasa solidaritas sosial
- d) Menjadi warga Negara yang baik, cemerlang, berperadapan, toleran, menghargai pruralisme dan HAM serta anti korupsi

## 2) Kompetensi utama

Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sesudah menyelesaikan pendidikannya di suatu program studi tertentu (Pasal 9 ayat 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004). Kompetensi utama dari prodi ekonomi syariah adalah:

- a) Memiliki ketrampilan untuk menjadi pemimpin dan manajer yang mengenali diri dan potensinya, mampu memahami orang lain, berkomunikasi secara efektif, belajar dari setiap kejadian dan kondisi, membuat keputusan, mengelola sumber daya yang tersedia dan bekerja secara tim
- b) Memahami sistem dan prinsip ekonomi Islam dengan baik dan mampu mengaplikasikannya dalam industri perbankan syariah, keuangan dan bisnis Islam
- c) Mampu memahami dan mengaplikasikan produk-produk perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya beserta akad-akadnya

- d) Mampu merancang produk-produk perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat
- e) Memiliki jiwa, semangat dan karakter sebagai seorang *entrepreneurship*
- f) Mampu membaca peluang serta memiliki keberanian dan ketrampilan dalam melakukan kegiatan bisnis secara Islami
- g) Mempunyai komitmen untuk menggali, mengkaji, menerapkan dan mengembangkan ilmu ekonomi Islam dengan segala aspek dan aplikasinya serta mengajak dan mendorong semua lapisan masyarakat menerapkan nilai-nilai Islam dalam dunia ekonomi, keuangan dan bisnis.

### 3) Kompetensi Pendukung

Dalam Pasal 9 ayat 4 Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 dijelaskan, kompetensi pendukung adalah kompetensi yang diharapkan dapat mendukung kompetensi utama. Adapun kompetensi pendukung dari prodi ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki ketrampilan berbahasa Indonesia dan asing (Arab dan Inggris) baik secara pasif maupun aktif

- b) Mampu menggunakan alat-alat analisis baik kuantitatif maupun kualitatif untuk memahami model-model yang digunakan dalam ilmu ekonomi perbankan, keuangan dan bisnis syariah
  - c) Mampu menggunakan komputer dan mengoperasikan *software* terapan yang digunakan dalam bidang ekonomi, perbankan, keuangan dan bisnis syariah sebagai alat untuk mengolah data, membuat bahan presentasi, maupun alat untuk berkomunikasi melalui media internet
  - d) Memiliki ketrampilan meneliti dan menulis karya ilmiah dalam bidang ekonomi, perbankan, keuangan dan bisnis syariah
  - e) Mampu memahami aspek-aspek serta *problem* hukum yang akan muncul dalam bidang perbankan, keuangan dan bisnis syariah.
- 4) Kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan atau lain adalah kompetensi yang dianggap perlu dimiliki oleh mahasiswa sebagai bekal mengabdikan di masyarakat baik yang terkait langsung maupun tidak langsung (Pasal 9 ayat 5 Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun

2004). Adapun kompetensi pilihan yang ditawarkan oleh Prodi Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

Kompetensi manajemen perbankan syariah:

- a) Memiliki keahlian dalam manajemen perbankan syariah
- b) Memiliki ketrampilan akutansi bank syariah
- c) Memiliki ketrampilan dalam analisis laporan keuangan bank syariah
- d) Memiliki ketrampilan dalam pemasaran bank syariah

Kompetensi manajemen keuangan Islam:

- a) Memiliki keahlian dalam manajemen keuangan Islam
- b) Memiliki keahlian dalam manajemen investasi syariah
- c) Memiliki kemampuan manajerial di bidang keuangan mikro syariah
- d) Memiliki ketrampilan akutansi lembaga keuangan syariah
- e) Memiliki kemampuan analisis keuangan syariah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI IAIN Sunan Ampel Surabaya Keputusan Rektor No. In.02/1/PP.00.9/269/P/2013, Dokumen 1 Kurikulum Program Studi Ekonomi Syariah. 18-21.